

PEMBANGUNAN PERTANIAN DENGAN PENDEKATAN KOMUNITAS: Kasus Rancangan Program Prima Tani

Syahyuti

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. Ahmad Yani No. 70, Bogor 16161*

ABSTRACT

Development concept explained in the mid of 20th century keeps improving. One of the concept improvements is application of "community-based development" concept. This concept criticizes the relatively unsuccessful rural development based on individuals and households. One of actual community-based development types is implemented in the Prima Tani Program planning. The Program planning consists of (i) the program is located at the rural areas as the smallest units, (ii) action plan was applied using participatory rural appraisal, (iii) encouraging self reliance, and (iv) uses of local institutional resources. The paper is a literature study based on the documents of Prima Tani Program planning and the writer's involvement in filed activities of the Program planning in West Nusa Tenggara Province. The assessment shows that it is necessary to well measure communal degree of the community. This is the basis for overall program implementation.

Keywords : *development, community, rural areas, Prima Tani*

ABSTRAK

Konsep pembangunan yang dijelaskan pada pertengahan abad ke 20 terus mengalami perbaikan. Salah satu bentuk perbaikan konsep adalah diterapkannya konsep "pembangunan berbasiskan komunitas". Konsep ini dapat dipandang sebagai kritik konsep pembangunan pedesaan selama ini yang berlandaskan kepada pendekatan individual dan rumah tangga yang dinilai kurang berhasil. Salah satu bentuk konkrit pembangunan berbasiskan komunitas diterapkan dalam rancangan program Prima Tani. Hal ini setidaknya terlihat dari empat aspek yaitu: penetapan lokasi program pada desa sebagai unit terkecil, penerapan PRA dalam penyusunan rencana aksi yang dilakukan secara partisipatif, upaya meningkatkan kemandirian, serta penggunaan sumberdaya kelembagaan setempat. Tulisan ini merupakan studi literatur yang didasarkan atas dokumen-dokumen rancangan Prima Tani serta keterlibatan penulis dalam melakukan kegiatan lapang Prima Tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelaahan membuktikan perlunya perhatian untuk mengukur derajat komunalitas warga secara baik. Hal ini merupakan titik tolak dalam pengimplementasian program secara keseluruhan.

Kata kunci: *pembangunan, komunitas, pedesaan, Prima Tani*

PENDAHULUAN

Pembangunan berbasis komunitas saat ini dapat dipandang sebagai salah satu paradigma baru dalam pembangunan pedesaan dan pertanian. Paradigma ini timbul karena kekurangan-puasan dalam pendekatan sebelumnya, yang cenderung individualistik dan bias ekonomi pasar. Penggunaan pendekatan berbasiskan komunitas menggunakan ikatan-ikatan horizontal sebagai pilar utama dan menggunakan kacamata yang lebih luas (dari sekedar pembangunan ekonomi) dapat dipandang sebagai langkah inovatif dalam pembangunan

pertanian. Ikatan horizontal dan suatu komunitas petani merupakan bagian dari kekuatan modal sosial (*social capital*) yang sangat penting untuk mengembangkan berbagai tindakan kolektif. Salah satu syarat tumbuhnya tindakan kolektif tersebut adalah dengan terbangunnya suasana yang partisipatif, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.

Program Rintisan dan Akselerasi Pemasaran Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) merupakan suatu model atau konsep baru pembangunan pertanian yang menggunakan paradigma pendekatan komunitas. Prima Tani mengandalkan inovasi tekno-

logi dan inovasi kelembagaan sebagai inti aktifitas, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan penghubung langsung antara Badan Litbang Pertanian sebagai penghasil inovasi dengan lembaga penyampaian maupun pelaku agribisnis pengguna inovasi. Pada prinsipnya, Prima Tani dirancang berfungsi ganda, yaitu sebagai modus diseminasi dan sekaligus sebagai laboratorium lapang sosial ekonomi teknologi Badan Litbang Pertanian. Prima Tani dilaksanakan mulai tahun 2005, dan akan berlanjut setidaknya sampai tahun 2009.

Tulisan ini berupaya memperkenalkan konsep-konsep pembangunan yang menggunakan basis komunitas. Program Prima Tani dijadikan sebagai objek kajian kritis, dengan mempelajari rancangan programnya, terutama mempelajari konsep-konsep pendekatan komunitas dalam rancangan tersebut. Tulisan ini juga sebagai abstraksi kritisi penulis melalui keterlibatan langsung penulis sebagai penyelia lapang dalam pengembangan Prima Tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam proses penerapan Prima Tani di lapangan.

PENGERTIAN "KOMUNITAS"

Dari sudut sosiologis, kata *community* berasal dari bahasa Latin "*munus*", yang bermakna *the gift* (memberi), *cum*, dan *together* (kebersamaan) antara satu sama lain. Dapat diartikan, komunitas adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan saling mendukung satu sama lain. Syarat pokok agar mereka dapat saling berbagi dan saling mendukung adalah adanya interaksi sosial sehari-hari yang intensif.

Secara umum, komunitas (*community*) adalah sekelompok orang yang hidup bersama pada lokasi yang sama, sehingga mereka telah berkembang menjadi sebuah "kelompok hidup" (*group lives*) yang diikat oleh kesamaan kepentingan (*common interests*). Dalam sosiologi, secara harfiah makna komunitas adalah "masyarakat setempat" (Soekanto, 1999). Komunitas dapat diartikan juga sebagai sekumpulan anggota masyarakat yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka dapat merasakan dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama. Artinya, ada

social relationship yang kuat di antara mereka, pada satu batasan geografis tertentu. Elemen dasar yang membentuk adalah adanya interaksi yang intensif di antara anggotanya, dibandingkan dengan orang-orang di luar batas wilayah. Ukuran derajat hubungan sosial, terkait dengan kesamaan tujuan adalah pemenuhan kebutuhan utama individu dan anggota pembentuk kelompok dalam masyarakat.

Pada sebuah komunitas ditemukan dua hal utama, yaitu kesamaan dan identitas (*similarity or identity*). Selain itu, juga selalu terdapat sikap berbagi (*sharing*), partisipasi, dan *felowship*. Komunitas terbentuk karena memiliki kepentingan yang sama (*common interests*) atau disebut *community of interest*. Dapat dikatakan bahwa makna komunitas adalah sekelompok orang yang didalamnya terdapat elemen berbagi (*shared element*) di antara mereka. Substansi dari *shared element* tersebut sangat luas, yaitu dari berbentuk situasi sampai ke *interest* dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dan bahkan nilai-nilai. Hal ini diwakili dalam konsep kolektivisme (*collectivism*).

Komunitas memiliki banyak makna. Ia dapat dimaknai sebagai sebuah kelompok dari suatu masyarakat (*forming a distinct segment of society*), atau sebagai sekelompok orang yang hidup di satu area khusus (*a group of people living in a particular local area*) yang memiliki karakteristik etnik dan kultural yang sama. Salah satu ciri khasnya adalah mereka memiliki sesuatu secara bersama-sama (*common ownership*). Jika bertolak dari pengertian ekologi, maka komunitas adalah sekelompok organisme yang saling tergantung pada satu wilayah, dan mereka saling berinteraksi ("*a group of interdependent organisms inhabiting the same region and interacting with each other*").

Komunitas dapat dibedakan atas berbagai pola, atas dasar ukuran (besar dan kecil), atas dasar level (lokal, nasional, internasional), riel atau tidak riel (virtual), bersifat kooperatif (*cooperative*) atau kompetitif (*competitive*), serta formal atau informal. Pada perkembangannya, konsep komunitas dipakai secara lebih luas. Untuk kesatuan hidup yang berada dalam satu wilayah tertentu disebut sebagai "*community of places*", sedangkan hubungan yang diikat arena kesamaan kepentingan namun tidak tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu (*borderless*) disebut dengan

"community of interest", misalnya sekelompok orang yang berada dalam satu jaringan pemasaran jeruk mulai dari daerah produksi di Kabupaten Tanah Karo (Sumatera Utara) sampai ke Pasar Induk Kramatjati di Jakarta.

Apapun definisinya, komunitas harus memiliki sifat interaksi (*the nature of interaction*). Yaitu interaksi yang informal dan spontan harus lebih banyak dari yang interaksi yang *procedurally formalized* (seperti dalam birokrasi), serta memiliki orientasi yang jelas (*goal-oriented*). Keanggotaan sebuah komunitas terbentuk lebih karena adanya struktur yang alamiah (*tight-knit web-like structure*); lebih dari struktur yang hierarkhis. Ciri utama sebuah komunitas adalah adanya keharmonisan, egalitarian, serta sikap saling berbagi nilai dan kehidupan. Contoh dari komunitas adalah kehidupan pada desa-desa di era pra modern.

Kenapa komunitas begitu penting? Karena "... community provides human beings with the unifying means of elevating the dignity of each person, providing for the needs and aspirations of all in a group, doing this in harmony with the natural environment, and making possible the communication and interaction between other social and political groups" (PBB, 2005). Begitu besar peran komunitas, karena dapat menjadi representatif kebutuhan individu-individu di dalamnya, dapat menciptakan keselarasan dengan alam, dan memungkinkan untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga di luarnya. Suatu komunitas tak akan dapat menutup dirinya sendiri. Ia harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan komunitas lain, secara lokal maupun global. Ada keterkaitan yang kuat antara satu komunitas dengan lainnya.

Komunitas merupakan unit-unit sosial yang memiliki otoritas sendiri dengan nilai-nilai bersama dan rasa memiliki satu sama lain. Suatu komunitas terjaga karena adanya kohesi sosial sesama mereka, dalam situasi dimana individu-individu diikat dengan orang lain oleh komitmen sosial dan kultural. Kohesi sosial terdapat dalam grup besar maupun kecil Menurut Mitchell (1994) ada 3 karakteristik kohesi sosial, yaitu (1) komitmen individu untuk norma dan nilai umum, (2) kesaling-tergantungan yang muncul karena adanya niat untuk berbagi (*shared interest*), dan (3) individu yang mengidentifikasi dirinya dengan grup tertentu.

BERBAGAI KONSEP PEMBANGUNAN BERBASIS KOMUNITAS

Bergulirnya konsep "bekerja dengan komunitas", merupakan bentuk kritik terhadap pendekatan pembangunan sebelumnya yang cenderung *top down* dan kurang memperhatikan keunikan, kemampuan, dan kespesifikan permasalahan tiap kelompok masyarakat. Secara umum dikenal tiga bentuk akifitas dengan komunitas (*community practice*), yaitu *social action*, *social planning*, dan *community development* (Adi, 2003). Pembangunan berbasis komunitas merupakan paradigma baru pembangunan ke pedesaan, karena gagalnya pendekatan individual yang menjadi landasan selama ini. Beberapa konsep pembangunan yang bertolak dari paradigma ini misalnya adalah *Community Development* dan *Community Based Management*. Namun, beberapa konsep lain juga menyertainya misalnya *capacity building* dan *empowerment*.

Community Development

Dalam definisi formal menurut PBB, *community development* adalah "... a process whereby the efforts of Government are united with those of the people to improve the social, cultural, and economic conditions in communities" (PBB, 2005). Dengan kata lain, *community development* adalah sebuah proses usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kondisi sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat.

Secara umum, *community development* (CD) adalah suatu konsep yang luas, yang mencakup berbagai bentuk upaya dengan mengaplikasikan teori dan praktek berupa kepemimpinan lokal (*civic leaders*), para aktifis (*activists*), dan melibatkan warga dan kalangan profesional untuk meningkatkan berbagai sisi kehidupan dari komunitas lokal. Dalam prakteknya, para pelaksana CD melakukan identifikasi permasalahan, mempelajari sumberdaya setempat, menganalisa struktur kekuasaan lokal, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan berbagai hal lain di masyarakat tersebut.

Pendekatan CD diperkenalkan tahun 1948 untuk menggantikan istilah "pendidikan massa" di Inggris. Definisi CD pada masa itu adalah sebagai "... suatu gerakan yang diran-

cang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan, berdasarkan inisiatif masyarakat. Hal ini meliputi berbagai kegiatan pembangunan di tingkat distrik, baik dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga non pemerintah.... (pengembangan masyarakat) harus dilakukan melalui gerakan yang kooperatif dan harus berhubungan dengan bentuk pemerintahan lokal terdekat” (Adi, 2003). Di Amerika Serikat, *community development* berakar dari disiplin ilmu pendidikan, terutama pendidikan di tingkat pedesaan, yaitu perluasan dari *Rural Extension Program* pada akhir abad ke 18.

Dalam prakteknya, usaha untuk mengimplementasikan CD adalah melalui konsentrasi kepada aktifitas, sumberdaya dan fasilitas yang ada, serta membentuk dasar-dasar sehingga pada masanya nanti komunitas setempat dapat mengontrol sendiri masa depannya. Beberapa prinsip dalam *community development* adalah:

- (1) Kebutuhan komunitas harus dilihat dalam pendekatan yang holistik. Meskipun prioritas dapat disusun secara sektoral misalnya, namun harus mampu menjelaskan keterkaitannya dalam perencanaan secara menyeluruh.
- (2) CD adalah proses. Artinya, proses mestilah menjadi bagian penting dalam seluruh aktifitas, sehingga dimonitor dan dievaluasi secara baik, dan diperlakukan sama pentingnya dengan hasil atau kemajuan yang diperoleh.
- (3) Pemberdayaan merupakan hasil dari pengaruh, partisipasi, dan pendidikan komunitas. Yang dituju oleh kegiatan CD adalah “pemberdayaan” dari komunitas bersangkutan. Ia akan dicapai apabila rangkaian aktifitas yang dijalankan merupakan kebutuhan dan keinginan komunitas bersangkutan, sehingga partisipasi dapat berjalan secara sempurna. Selain itu, seluruh tahapan haruslah dipandang sebagai sebuah proses pendidikan bagi komunitas.
- (4) Aktifitas yang dijalankan harus menjamin bahwa lingkungan sekitar diperhatikan dengan baik.
- (5) Mempertimbangkan keberlanjutannya (*sustainability*).

- (6) Kemitraan antar seluruh pelaku akan lebih menjamin akses kepada sumberdaya secara lebih adil.

Community development merupakan pembangunan dari bawah (*bottom up*), sebagai lawan dari pendekatan *social planning* yang *top down approach*. Namun, konsep *community development* tidak semata-mata masalah atas-bawah. Satu hal yang penting adalah terjadinya redistribusi tanggung jawab dan otoritas, serta penggantian kekuasaan (*shift in power*). Konsep ini merupakan kritik dari pendekatan pembangunan yang menggarap manusia secara individu demi individu.

Dalam perkembangannya, istilah CD difokuskan pada aspek-aspek tertentu. Karena itu misalnya dikenal “*Community Economic Development*” (CED), dengan penekanan pada aktifitas ekonomi. CED bertolak dari kondisi dan bekerja untuk komunitas setempat (*citizen-led*), ditujukan untuk peningkatan kehidupan melalui distribusi kesejahteraan (*wealth distribution*), pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*), dan penciptaan lapangan kerja (*job creation*). Untuk mendukung aktifitas bisnis setempat, penyediaan infrastruktur merupakan suatu hal yang penting.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa CD memiliki makna yang luas. Selain menjelaskan bagaimana operasionalisasi di lapangan, CD sesungguhnya lebih sebagai kerangka berpikir, serta sikap untuk berpihak. Konsep *capacity building* dapat diposisikan sebagai alat, dimana CD sebagai semangatnya atau ideologinya. Ringkasnya, *capacity building* adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan CD.

Community-Based Management

Konsep “*Community-Based Management*” (CBM) juga mengandalkan kepada “komunitas”, dimana komunitas merupakan sebagai pelaku utama pembangunan. Semua yang datang dari luar hanyalah pendukung untuk membantu komunitas. Komunitas didukung melalui berbagai hal mulai dari penelitian, pengembangan kebijakan, pendidikan dan *capacity building*, serta mengembangkan *networks and linkages*. *Community-Based Management* dapat dilakukan pada komunitas manapun, baik di pertanian, perikanan, kehutanan, maupun industri pedesaan.

Satu konsep yang dekat dengan *Community-Based Management* adalah *Community-Based Resource Management* (CBRM) yang merupakan suatu pendekatan pembangunan yang menekankan kepada kesalinghubungan antara manusia dengan segala hal di lingkungannya. *Community-Based Resource Management* adalah "... a development approach that emphasizes the interconnectedness of humans and all other living beings and their natural environment" (Anonimous, 2005a). Kerusakan sumberdaya alam, akan berdampak kepada kehidupan manusia. Karena itu, manusia harus mengontrol aktifitasnya, misalnya dengan selalu menggunakan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewal*) dan berkelanjutan. *Community-Based Resource Management* dimulai dengan pengembangan komunitas (*building communities*), yang terdiri atas individu-individu yang paham tentang ekosistemnya, mengerti tentang tempatnya di dalam ekosistem, dan ingin bekerja dengan orang lain secara inklusif dan hormat untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan lingkungannya, mencoba untuk menyediakan kehidupan yang *sustain* untuk generasi sekarang dan mendatang, serta memiliki komitmen dengan keadilan sosial (*social justice*). *Community-Based Resource Management* mengintegrasikan ilmu ekonomi, sosial, dan lingkungan dan melihat kepada berbagai institusi sosial yang ada.

Dari konsep *Community-Based Management*, juga lahir pendekatan *Community-Based Natural Resource Management* (CBNRM) dengan tekanan pada sumberdaya alam. CBNRM adalah "... an approach of natural resource management by, for and with local communities with the objectives of improving livelihood and security of local people, empowering them, and enhancing conservation Efforts" (Adhikari, 2001). Pada prinsipnya, CBNRM adalah suatu aktifitas yang menekankan pada manajemen sumberdaya alam oleh, untuk, dan dengan komunitas lokal (Gibbs dan Bromley, 1989). Keberlanjutan CBNRM sangat tergantung kepada partisipasi komunitas lokal. Mereka akan aktif jika mereka mampu melihat keuntungan dengan keterlibatannya dan memiliki akses (*property right*) terhadap sumberdaya. Untuk itu, penting untuk memahami pengetahuan lokal masyarakat setempat, membangkitkan motivasi untuk melakukan konservasi, serta memilih organisasi lokal yang kuat.

Ada tiga tujuan utama CBNRM, yaitu: (1) peningkatan kesejahteraan dan keterjaminan hidup masyarakat lokal, (2) peningkatan konservasi sumberdaya alam, dan (3) pemberdayaan masyarakat lokal. Asumsi pentingnya peranan masyarakat lokal adalah, bahwa: efisiensi yang lebih besar dalam manajemen SDA bersumber dari pengetahuan masyarakat setempat, lebih menghemat biaya, dan keputusan yang lebih baik akan dicapai melalui internalisasi biaya sosial dan lingkungan. Tingginya efektifitas jika mengandalkan manajemen masyarakat lokal adalah karena masih berjalannya mekanisme tekanan dan sanksi, dapat menggambarkan secara lebih detail pengetahuan lokal dan dinamika ekologi yang khas, serta komunitas lokal akan lebih mendorong konservasi sumberdaya alam.

Penduduk akan terlibat hanya bila mereka melihat keuntungan (*tangible benefits*) secara kasat mata baik dari sisi produk yang akan dihasilkan, jasa yang diberikan, ataupun pendapatan. Selain itu, mereka mau terlibat bila memiliki kemampuan yang sesuai dari sisi pengetahuan dan teknologi. Karena itulah, *local indigenous knowledge* perlu dipertimbangkan. Tiga faktor lainnya adalah jika ada jaminan untuk dapat memanfaatkan produk maupun jasa, adanya akses yang terbuka, dan hadirnya dukungan organisasi lokal.

Dalam menyusun instrumen kebijakan dan pendekatan, persyaratannya berbeda antar level. Pada level lokal dan lapang harus fokus pada pengembangan sistem manajemen dan bertolak dari kondisi nyata (*"real life"*) penduduk lokal; pada level menengah (*intermediate level*), baik pemerintah maupun NGO harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pendekatan pembangunan dalam aktivitas yang konkret; dan pada level nasional, harus mampu merinci dan mengimplementasikan kebijakan payung yang tepat.

Untuk mengimplementasikan CBM, dapat diawali dengan sebuah *focus group discussion* yang membahas konsep kerangka kerja atau model yang umum yang akan digunakan, kisaran ukuran keberhasilan, serta ragam bentuk intervensi luar yang dibutuhkan. Secara umum, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah (Crawford *et al.*, 2000): (1) tahap masuk ke masyarakat, untuk melakukan persiapan dan penilaian; (2) perencanaan, termasuk pembentukan kelompok inti, pemilihan lokasi, pembentukan aturan, penentuan

mekanisme pengelolaan dan pengaturan keuangan; (3) penyusunan perencanaan dan penganggaran; dan (4) implementasi.

Keberhasilan CBM tidak hanya tergantung pada apa yang telah dilakukan pada tingkat desa tetapi juga pada lembaga yang terlibat dan yang akan mereplikasi kegiatan serupa di tempat lain. Faktor-faktor yang akan menjadi kunci di antaranya adalah: keterampilan dari petugas lapangan yang ditugaskan, pemahaman yang baik dari pendekatan-pendekatan dari kasus-kasus yang berhasil, dekatnya hubungan lembaga pendukung di tingkat lokal dengan masyarakat, dan adanya dukungan politik pemerintah. Dari sisi internal, perlu kepemimpinan organisasi yang cakap, strategi dan tujuan organisasi yang jelas, sumberdaya manusia dan logistik yang cukup, pendekatan pengelolaan yang dapat diadaptasikan dalam situasi dan konteks yang berubah-ubah, harapan-harapan yang wajar terhadap waktu dan usaha yang diperlukan, serta kelanjutan keterlibatan dengan masyarakat.

Dalam tahap pra implementasi perlu dibangun *capacity building*, serta partisipasi dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman. Kunci pokoknya adalah bekerja penuh dengan komunitas semenjak dari awal. Secara bertahap, komunitas akan mengambil alih tanggung jawab ketika kapasitasnya juga meningkat. Karena itu, partisipasi dan dukungan komunitas harus memadai. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas (*capability building*) untuk komunitas. Perlu rasa memiliki yang kuat pada masyarakat terhadap daerahnya, pengembangan kapasitas masyarakat, harus menganut pendekatan *co-management* dimana masyarakat dan pemerintah secara aktif bekerja bersama, dan adanya pemimpin lokal yang kuat dan mendukung. Untuk lembaga pendukung dari luar yang terlibat, harus memahami proses perencanaan partisipatif, mempunyai kepemimpinan yang mendukung dan komitmen, memiliki sumberdaya yang cukup dan tenaga pendamping masyarakat yang terlatih, dan berdomisili di wilayah setempat.

Capacity-Building

Capacity-building (pengembangan kapasitas) adalah satu strategi yang dapat dipraktekkan dalam aktifitas pembangunan, terutama yang menyangkut aktifitas bersama de-

ngan masyarakat. Ia merupakan upaya penguatan sebuah komunitas dengan bertolak dari kekayaan tata nilai dan juga prioritas kebutuhan mereka, dan mengorganisasikan mereka untuk melakukannya sendiri. Menurut Eade dan William (1995), *capacity building* adalah “...*strengthening people’s capacity to determine their own values and priorities, and to organize themselves to act on these, is the basic of development*”

Sementara menurut Mildeberger (1999) *capacity building* adalah “... *to enhance the capability of people and institutions sustainably to improve their competence and problem-solving capacities*”. Dalam pengertian ini, *capacity building* berperan sebagai instrumen atau alat yang mendukung penggunaan potensi dan kapasitas yang ada secara efisien, memperluas kondisi yang ada, dan juga berupaya membangkitkan potensi-potensi baru.

Ada berbagai definisi tentang *capacity building*, namun ada kesamaan satu sama lain, dimana objeknya adalah individu, organisasi, dan juga sistem. Secara umum *capacity building* adalah “... *placing emphasis on the ability of individuals, organisations and systems to set and implement development objectives in a sustainable way*” (Anonimous, 2005b). Batasan ini kelihatan agak menyederhanakan, padahal dalam prakteknya cukup kompleks.

Sebagaimana konsep pembangunan, *capacity building* juga fokus kepada permasalahan hubungan-hubungan sosial dan politik. Karena itu, ia tidak dapat dipandang sebagai terisolasi dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dari sisi level, maka dalam melakukan *capacity building* akan tercakup didalamnya apa dan bagaimana peran untuk pemerintah, pasar, sektor swasta, NGO, serta komunitas, rumah tangga, dan individual.

Dalam konteks *capacity building* sebagai sebuah pendekatan dalam pembangunan, maka akan melibatkan identifikasi berbagai kendala dalam pembangunan. Pembangunan pada pokoknya adalah bagaimana agar dicapai perubahan positif dalam hidup, kemajuan personal bersama-sama dengan kemajuan masyarakat secara umum, dan bagaimana proses serta hasilnya terhadap upaya penguatan kemiskinan, ketidak-adilan, diskriminasi, dan merealisasikan potensi manusia melalui keadilan sosial dan ekonomi. Dalam kon-

teks ini, maka *capacity building* adalah "... the process of transforming lives, and transforming societies". Jadi, *capacity-building* adalah sebuah bentuk respon menuju proses yang multi dimensi, tidak semata-mata hanya sekedar intervensi teknik. Ada berbagai aspek kapasitas yang harus dibangun dalam CB, yaitu terjadinya pembangunan intelektual, organisasional, sosial, politik, kultural, material, maupun finansial (Eade, 1997).

Capacity building dapat diartikan juga sebagai "dukungan". Yaitu mencakup dukungan pihak luar terhadap satu komunitas tertentu. Dalam konteks ini, ada dua langkah pokok dalam mengimplementasikan *capacity building*, yaitu: *pertama*, menilai apa jenis dan level dukungan yang paling tepat yang dibutuhkan komunitas; dan *kedua*, memonitor dan memodifikasi berbagai hasil negatif dari dukungan tersebut. Langkah kedua ini merupakan kegiatan khas yang selama ini tampaknya kurang diperhatikan. Umumnya pelaksana pembangunan terlalu yakin dengan pendekatan dan program yang mereka implementasikan. Hampir tak ada ruang untuk berpikir ulang, bahwa sangat mungkin pendekatan tersebut kurang tepat. Jika pun ada evaluasi, biasanya dilakukan setelah program berjalan penuh.

Capacity-building menolak konsep "*trickel down effect*" yang selama ini menjadi konsep umum dan banyak dijabarkan dalam pembangunan. "*Trickel down effect*" adalah konsep yang percaya bahwa dengan menggarap beberapa titik tertentu dalam satu wilayah, maka akan menyebar dengan sendirinya ke wilayah sekitar. Seperti setetes tinta di jatuhkan di permukaan kertas, maka ia akan segera menyebar ke area sekitarnya.

Untuk dapat mengerti pendekatan *capacity building* dapat pula dengan mengetahui apa yang menjadi bukan cirinya. Eade (1997) menyampaikan empat ciri yang bukan merupakan *capacity building*. Ia menyatakan bahwa *capacity building* tak akan menciptakan ketergantungan, *capacity-building* bukan berarti melemahkan peran negara, *capacity-building* bukanlah aktifitas yang terpisah-pisah, dan *capacity-building* tidak semata-mata memperhatikan keberlanjutan finansial.

Ada berbagai model dalam aktifitas yang berlandaskan *capacity-building*. Beberapa contoh berikut dapat dipakai, yaitu (Eade, 1997): (1) bekerja dengan posisi sebagai inter-

mediaries, (2) menciptakan sinergi dalam komunitas dan pada lingkup, (3) mempromosikan organisasi yang representatif, (4) menciptakan organisasi yang independen, atau (5) pemerintah dan NGO bekerja secara paralel bersama-sama. Selanjutnya, ada tiga level yang dapat menjadi objek dalam *capacity building*, yaitu: (1) level individu dan kelompok kecil (*small group*), (2) level institusi dan organisasi, dan (3) level sistem institusi secara keseluruhan mencakup institusi hukum, politik, serta kerangka pikir ekonomi dan administratif. Peningkatan kapasitas individu biasanya berupa pelatihan-pelatihan untuk memperbaiki pengetahuan dan keterampilan, sedangkan untuk institusi dan organisasi dikenal misalnya pendekatan *social learning process*.

Bagaimana mengukur kapasitas suatu kelompok masyarakat? Pendekatan yang ditawarkan oleh UNDP, yang idenya dipinjam dari sektor swasta, dimana individu, kelompok sosial, dan lingkungan merupakan kunci penting dari kegiatan *capacity building*. Pengukurannya menggunakan pendekatan sistem (*systems approach*), dengan memberi penekanan pada manajemen inter-relasi antar berbagai institusi, serta pendekatan individu dan keorganisasian. Jika ingin menggambarkan kapasitas nasional, maka dapat dengan menggabungkan kapasitas yang ada pada seluruh level, baik nasional, regional, maupun komunitas.

Menurut UNDP, dalam pengembangan masyarakat dengan pendekatan *capacity-building* perlu dijawab empat pertanyaan pokok, yaitu: *Where are we now? Where to we want to be? How to get there? How to stay there?* Kapasitas masyarakat secara umum akan tergantung kepada lembaga yang hidup (*viable institutions*), kepemimpinan yang memiliki visi, dukungan finansial dan sumberdaya material, keterampilan sumberdaya manusia, dan kerja yang efektif termasuk sistem, prosedur, dan insentif kerja yang sesuai. Visi yang jelas dan didukung anggota komunitas (*shared vision*) akan dicapai bila didahului proses saling mengkomunikasikan dan berbagi pemahaman antar pihak. Selain itu, juga perlu dibangun konsensus (*consensus building*), serta menyediakan penjelasan dengan konteks yang lebih luas (*broader context*) antar pihak yang akan terlibat. Untuk mengukur hasil kerja sebuah aktifitas *capacity-building*, maka beberapa

pa prinsip yang sebaiknya dipakai adalah: pelibatan banyak aktor baik pihak pemerintah maupun bukan sehingga penilaian akan lebih kaya dan seimbang, menggunakan beragam pendekatan, sehingga akan lebih mendalam dan juga lengkap, jelas dalam hal skala kegiatan dan waktu (duration) pelaksanaan, tidak kehilangan fokus terhadap tujuan utama dan spesifikasi aktifitas *capacity-building* yang dievaluasi; dan aktifitas penilaian harus bertolak dari permintaan (*demand orientation*) bukan karena telah dianggarkan.

KONSEP DAN BERBAGAI INDIKATOR PEMBANGUNAN BERBASIS KOMUNITAS DALAM RANCANGAN KONSEP PRIMA TANI

Konsep Rancangan Program Prima Tani

Semenjak tahun 2005, Badan Litbang Pertanian mengintroduksi Pengembangan Model Prima Tani yang bisa dipandang sebagai langkah terobosan untuk mempercepat dan memantapkan inovasi teknologi pada kondisi nyata di lapangan dengan agroekosistem yang beragam. Prima Tani pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari paradigma baru dalam proses adopsi inovasi berupa penyuluran (*delivery*) dan penerapan (*receiving/adopsi*) (Simatupang, 2004).

Dalam paradigma "*Penelitian untuk Pembangunan*", peranan kegiatan diseminasi diposisikan sama penting dengan kegiatan penelitian dan pengembangan. Kalau pada masa lalu, diseminasi praktis hanya untuk menginformasikan dan menyediakan teknologi sumber/dasar secara terpusat di Balai Penelitian, maka kini dengan paradigma *Penelitian untuk Pembangunan*, diseminasi diperluas dengan juga melaksanakan pengembangan percontohan sistem dan usaha agribisnis berbasis teknologi inovatif dan penyediaan teknologi dasar secara terdesentralisasi sebagai inisiatif untuk merintis pemasyarakatan teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian. Sasaran kegiatan diseminasi juga disesuaikan, dari tersebarunya informasi kepada masyarakat pengguna teknologi menjadi tersedianya contoh konkrit penerapan teknologi di lapangan.

Dipandang dari segi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, Prima Tani merupakan wahana untuk pelaksanaan

penelitian dan pengembangan partisipatif dalam rangka mewujudkan penelitian dan pengembangan berorientasi konsumen atau pengguna (*consumer oriented research and development*). Dilihat dari segi pelaksanaan kegiatan diseminasi, Prima Tani merupakan wahana untuk menghubungkan secara langsung Badan Litbang Pertanian sebagai penyedia teknologi sumber/dasar dengan masyarakat luas atau pengguna teknologi secara komersial maupun lembaga-lembaga pelayanan penunjang pembangunan. Dengan demikian, adopsi teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian tidak saja tepat guna, tetapi juga langsung diterapkan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis, setidaknya dalam tahapan rintisan.

Prima Tani dapat dipandang sebagai sebuah bentuk rekayasa sosial melalui pendekatan kelembagaan. Berbagai bukti selama ini menunjukkan bahwa kendala kelembagaan seringkali menjadi penghalang yang serius dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Dalam konteks ini, penyempurnaan sebuah bangun kelembagaan akan jauh lebih berhasil apabila pembelajaran (*lesson learn*) dilakukan semenjak dari tahap awal. Keterlibatan tim peneliti secara langsung (*action research*) semenjak awal kegiatan dalam seluruh proses tentu saja akan lebih mampu memberi perbaikan yang mbumi dan sesuai dengan permasalahan lokal. Prima Tani merupakan suatu model atau konsep baru diseminasi teknologi dan kelembagaan yang bertujuan untuk mempercepat dan mengefektifkan informasi dan teknologi yang dihasilkan lembaga penelitian khususnya Badan Litbang Pertanian kepada petani.

Berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya, Prima Tani dilaksanakan dengan empat strategi, yaitu: (1) Menerapkan teknologi inovatif tepat-guna melalui penelitian dan pengembangan partisipatif (*Participatory Research and Development*) berdasarkan paradigma "*Penelitian untuk Pembangunan*"; (2) Membangun model percontohan sistem dan usaha agribisnis progresif berbasis teknologi inovatif dengan mengintegrasikan sistem inovasi dan sistem agribisnis; (3) Mendorong proses difusi dan replikasi model percontohan teknologi inovatif melalui program dan demonstrasi lapang, diseminasi informasi, advokasi serta fasilitasi; dan (4) Basis pengem-

bangun dilaksanakan berdasarkan wilayah agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi setempat.

Penting dikemukakan bahwa Prima Tani berupaya membangun model percontohan sistem dan usaha agribisnis progresif berbasis teknologi inovatif yang memadukan sistem inovasi dan sistem agribisnis, sehingga mampu mewujudkan suatu model terpadu Penelitian – Penyuluhan – Agribisnis – Pelayanan Pendukung (*Research – Extension – Agribusiness – Supporting Service Linkages*).

Penerapan inovasi teknologi oleh petani mestilah dipandang sebagai aktifitas dari sebuah sistem. Keputusan untuk mengadopsi suatu jenis teknologi tidaklah semata-mata aspek teknis belaka, karena merupakan resultan dari pengintegrasian beberapa komponen antara lain berupa sumberdaya alam, sosial ekonomi, kelembagaan dan kebudayaan masyarakat setempat. Atas dasar inilah, sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh aspek tersebut, perlu dipertimbangkan sikap, kebutuhan, dan keinginan masyarakat tersebut. Ini dapat menjadi indikator sederhana untuk memahami keseluruhan sistem tersebut yang tentu membutuhkan waktu lama untuk mempelajarinya.

Kegiatan Prima Tani dapat pula dipandang sebagai sebuah rekayasa kelembagaan dengan segala aspeknya. Proses penghantaran inovasi teknologi dalam konsep pengembangan sistem agribisnis wilayah, pada pokoknya dilakukan oleh sekumpulan manusia dengan beragam latar belakang, peran, tanggung jawab, kemampuan, dan motivasi. Artinya, ini dapat dipandang sebagai sebuah aksi yang berada dalam konteks situasi sosial (*social situation*). Karena itu, hubungan-hubungan sosial merupakan bagian penting yang akan menentukan keberhasilan Prima Tani secara keseluruhan.

Kelembagaan utama yang dibangun dalam program Prima Tani adalah sebuah model sistem agribisnis yang disebut dengan Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP). AIP dapat dipandang sebagai usaha pertanian dengan ditunjang oleh berbagai lembaga pendukungnya yang terkait secara institusional (Pranadji, 2004). AIP merupakan bingkai inovasi dan sekaligus sebagai bagian dari inovasi Prima Tani. Tiga tujuan dalam AIP harus adalah: peningkatan daya saing atau nilai tambah

total sumberdaya (wilayah), terwujudnya *sharing system* untuk mewujudkan keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta keberlanjutannya dengan berbasis sumberdaya alam dan penguatan pengetahuan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, AIP dirancang dengan pemihakkan pada penguatan usaha dan sumberdaya manusia atau pelaku agribisnis di pedesaan.

AIP menuntut keserasian antara kelompok tani dengan pelaku agribisnis lainnya, serta adanya *sharing system* yang proporsional antara petani dan pelaku agribisnis terkait lainnya. Selanjutnya (Pranadji, 2004) juga mengatakan bahwa AIP dibangun melalui hasil musyawarah petani yang tergabung dalam organisasi kelompok atau gabungan kelompok tani.

Pengembangan sistem dan usaha agribisnis diarahkan untuk melakukan proses transformasi struktur agribisnis dari pola dispersal menjadi pola industrial. Dalam agribisnis pola industrial, sebagaimana terbaca dalam situs resmi Badan Litbang Pertanian (Badan Litbang Pertanian, 2005), setiap perusahaan agribisnis tidak lagi berdiri sendiri atau bergabung dalam asosiasi horizontal, tetapi memadukan diri dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam seluruh bidang usaha yang ada pada satu alur produk vertikal (dari hulu hingga hilir) dalam satu kelompok usaha yang selanjutnya disebut sebagai AIP. Inovasi agribisnis dalam Prima Tani memiliki beberapa karakteristik, yaitu (Deptan, 2004):

- (1) Lengkap secara fungsional. Seluruh fungsi yang diperlukan dalam menghasilkan, mengolah, dan memasarkan produk pertanian hingga ke konsumen akhir (alur produk vertikal) dapat dipenuhi.
- (2) Satu kesatuan tindak. Seluruh komponen atau anggota melaksanakan fungsinya secara harmonis dalam satu kesatuan tindak.
- (3) Ikatan langsung secara institusional. Hubungan di antara seluruh komponen atau anggota terjalin langsung melalui ikatan kelembagaan (non pasar).
- (4) Satu kesatuan hidup. Kelangsungan hidup dan perkembangan setiap komponen atau anggota saling tergantung satu sama lain.

- (5) Koperatif. Setiap komponen atau anggota saling membantu satu sama lain demi untuk kepentingan bersama.

Beberapa Bukti Penerapan Pendekatan Pembangunan Berbasis Komunitas

Dengan mencermati konsep-konsep yang dikemukakan dalam dokumen rancangan Prima Tani, maka terlihat berbagai bukti diterapkannya pendekatan pembangunan yang berbasis komunitas di dalamnya. Bukti-bukti tersebut diuraikan satu per satu sebagai berikut.

Program Prima Tani Menetapkan Desa sebagai Unit Terkecil dari Program

Dalam rancangan program Prima Tani, unit terkecil adalah satuan administrasi pemerintahan, misalnya desa, bukan keluarga, ataupun individual. Artinya, seluruh warga dalam satu desa merupakan penerima atau pelaku aktif dari Prima Tani, baik mereka yang menjadikan pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama maupun warga desa yang bekerja di sektor *off farm* maupun *non farm*. Dengan menetapkan desa sebagai unit terkecil, maka seluruh tahapan proses nantinya mesti melibatkan seluruh warga desa.

Sejalan dengan itu, unit utama pelaku agribisnis yang menjadi tulang punggung dalam Prima Tani disebut dengan Unit AIP (Pranadji, 2004). Dalam dokumen rancangan terlihat, bahwa kelembagaan agribisnis tersebut menjadikan warga satu desa sebagai pelaku utama yang akan menjadi penggerak utamanya. Pada tingkat perkembangan lebih lanjut, pelaku-pelaku ekonomi di desa harus menjalin kerjasama dengan berbagai pelaku ekonomi lain di luar desa.

Secara teoritis, sekelompok orang dalam satu desa dapat dipandang sebagai sebuah komunitas. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa bentuk kesatuan hidup alamiah yang nyata dan masih hidup dengan baik, sesungguhnya tidak ditemukan di tingkat desa namun pada sebuah dusun atau *dukuh* (Tjondronegoro, 1990). Dengan kata lain, ciri-ciri kesatuan hidup yang disebut dengan "komunitas" tersebut sesungguhnya ada pada kesatuan dusun. Namun demikian, desa masih dapat dipandang sebagai sebuah komunitas

dalam derajat tertentu, yang misalnya terlihat dari tingginya ikatan-ikatan sosial sesama warga sedesa. Selain itu, berbagai keputusan politik masih berada di tingkat desa, karena desa merupakan unit administrasi pemerintahan terkecil yang diakui dalam birokrasi pemerintahan.

Menggunakan Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Perencanaan

Penyusunan rancangan Prima Tani di satu desa dilakukan dengan menerapkan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yang dilakukan terutama oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat dengan masyarakat. PRA merupakan istilah yang diberikan kepada pendekatan yang menggunakan metode partisipatif dengan menekankan kepada pengetahuan lokal dan kemampuan masyarakat untuk membuat penilaian sendiri, menganalisis sendiri, dan merencanakan sendiri. PRA memfasilitasi proses saling berbagi informasi (*information sharing*), analisis, dan aktifitas antar *stakeholders*. PRA, yang lahir pada 1980-an, dikembangkan dari konsep "*Rapid Rural Appraisal*" (RRA) yang merupakan seperangkat teknik yang digunakan praktisi pembangunan di pedesaan untuk mengkoleksi dan menganalisa data (Conway dan Chambers, 1992). RRA dikembangkan pada dekade 1970-an dan 1980-an sebagai respon dari kesadaran bahwa pihak luar (*outsiders*) seringkali kehilangan (*missing*) atau salah paham (*miscommunicating*) dengan masyarakat lokal ketika melakukan kegiatan pembangunan bersama.

Pada awal 1970-an disadari bahwa program alih teknologi tak selalu sesuai untuk orang miskin. Ada hubungan yang kompleks antara faktor lingkungan, ekonomi, sosial, serta budaya. Seharusnya hal ini dipandang sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Tak mungkin merubah satu elemen tanpa mempengaruhi elemen lain. Implikasinya, ekonomi yang berkembang di satu desa saling terkait dengan misalnya bagaimana penduduk memposisikan lingkungan, bagaimana motivasi hidup mereka, serta nilai-nilai apa yang mereka pegang teguh. Jadi, sistem harus dipahami sebagai satu kesatuan.

PRA berada dalam konteks *collaborative decision making*, dan merupakan salah

satu bentuk *community-based method* dalam pembangunan pedesaan. Dalam PRA, koleksi dan analisis data dilakukan oleh masyarakat lokal, sedangkan pihak luar lebih sebagai fasilitator daripada sebagai pengontrol kegiatan. Pada hakekatnya, PRA adalah suatu pendekatan untuk belajar bersama (*shared learning*) di antara masyarakat lokal dan pihak luar.

Satu konsep utama yang menjadi tiang PRA adalah "*localization*" (Conway dan Chambers, 1992). Artinya, PRA harus menggunakan secara ekstensif dan kreatif sumberdaya setempat, seberapapun terbatasnya sumberdaya yang tersedia. Untuk itu PRA berupaya menghindari sikap dan penilaian sumberdaya dari luar memiliki keunggulan berlebihan.

Prima Tani Berupaya Mengembangkan Kemandirian

Sejalan dengan penggunaan konsep komunitas, maka Prima Tani juga berupaya mengembangkan kemandirian bagi warga desa untuk dapat melanjutkan sendiri aktifitas yang telah dimulai yang sebelumnya didukung oleh berbagai pihak luar. Penyusunan rencana lapang yang dieksplorasi dengan metode PRA merupakan upaya untuk menimbulkan sikap dan kemampuan untuk mengelola diri sendiri. Dalam PRA, dokumen aksi yang berhasil disusun merupakan milik dari warga desa. Artinya, mereka memiliki ikatan mental untuk merealisasikan dokumen tersebut secara mandiri. Jika bantuan dari pihak luar telah berkurang, maka mereka sendiri harus mampu menggali berbagai potensi baik dari dalam maupun dari luar komunitas.

Untuk menunjang kemandirian, Prima Tani menghindari pemberian bantuan yang tidak mendidik dan menimbulkan ketergantungan. Pemberian bantuan berupa perangkat keras teknologi berupa bibit, pupuk, obat-obatan, dan alsintan, sejauh mungkin dihindarkan. Pemberian bantuan kepada petani dilakukan jika hal itu pemberian insentif, namun demikian hal ini tidak dalam skala besar dan bersifat gratis. Jika harus memberikan bantuan modal, maka hal itu berupa pinjaman yang harus dikembalikan secara tepat waktu.

Prima Tani Berlandaskan kepada Sumberdaya Kelembagaan Setempat

Pengembangan kelembagaan dalam pembangunan berbasis komunitas merupakan hal yang sangat esensial, dan dalam Prima Tani dikatakan sebagai inovasi. Ada empat langkah pokok dalam inovasi kelembagaan di Prima Tani, yang mesti dijalankan secara berurutan. *Pertama*, identifikasi jenis-jenis aktivitas yang akan dilakukan dalam rancangan Prima Tani di lokasi. Inti dari kelembagaan adalah interaksi, dimana sekelompok interaksi yang berbentuk sama atau sejenis melahirkan bentuk 'aktifitas'. Seluruh aktifitas dalam Prima Tani dapat dibagi atas enam kelompok yaitu: pemenuhan teknologi (*software*), pemenuhan input atau sarana produksi, pemenuhan permodalan usaha, pemenuhan tenaga kerja, kegiatan usahatani, dan pemasaran hasil produksi.

Kedua, memahami jenis, bentuk, dan sifat interaksi yang terdapat dalam masing-masing kelompok aktifitas; khususnya tentang motivasi ekonomi dari pelaku dalam interaksi tersebut. Derajat ekonomi suatu interaksi bervariasi, dan merupakan kontinum dari yang sifat ekonominya paling rendah (= bersifat sosial) menuju yang paling tinggi. Tujuan pokok dari interaksi yang berciri sosial adalah untuk berbuat baik terhadap orang lain tanpa mengharap imbalan apapun. Sebaliknya pada interaksi dengan motivasi ekonomi yang kuat, tujuan interaksi adalah untuk mendapatkan materi atau keuntungan. Selain itu, interaksi yang berciri sosial merupakan interaksi personal yang melibatkan hubungan batin, perasaan, dan emosi mendalam; bukan bersifat impersonal, tidak kenal dan dekat. Hukuman sosial (*punishment*) pada interaksi sosial hanya berupa hukuman non-materi, misalnya rasa malu; namun pada interaksi berciri ekonomi berupa hukuman materi, misalnya dengan pengurangan upah, gaji, dan lain-lain. Tiap kelembagaan umumnya didominasi oleh satu jenis interaksi tertentu. Dengan mengenal jenis interaksinya berarti kita akan dapat mengenal sifat kelembagaannya.

Ketiga, memahami sifat komunalitas (atau individualitas) masyarakatnya. Jika suatu komunitas masyarakat sangat mandiri dan individualistis, maka tindakan kolektif melalui sistem kelembagaan akan sulit dibangun. Tindakan kolektif hanya akan efektif apabila ma-

syarakatnya masih kental ciri komunalitasnya, dimana mereka masih senang dengan kebersamaan, guyub, dan saling menolong. Ini penting untuk mengetahui apakah interaksi lebih untung dan efisien secara kolektif ataukah secara individual?

Keempat, merumuskan opsi kelembagaan yang sesuai. Rancangan kelembagaan dapat ditentukan melalui derajat ekonomi yang ingin dibangun dalam kelembagaan tersebut. Derajat interaksi dibagi atas tiga yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan, pilihan kolektifitas dibedakan menjadi mandiri, individual, atau kolektif. Sebagai contoh untuk pemenuhan input sarana produksi dapat menggunakan tujuh pilihan sebagai berikut, yaitu:

1. *Petani-mandiri*, yaitu jika petani telah mampu memenuhi sarana produksi sendiri, terutama bagi golongan petani kaya.
2. *Petani- pemerintah-individual*. Dalam Prima Tani ada peluang bagi BPTP atau Dinas Pertanian setempat untuk memberikan bantuan benih secara cuma-cuma dalam jumlah terbatas. Pemberian langsung kepada individu tidak membutuhkan kelembagaan apapun.
3. *Petani-pemerintah-kolektif*. Jika bantuan dipandang akan lebih terkontrol jika diberikan secara kolektif, maka koperasi atau kelompok tani dapat digunakan. Pemberian secara kolektif ini akan lebih terkontrol penggunaannya, serta memudahkan pula jika harus dikembalikan. Pola ini dapat dinilai lebih adil karena masyarakat sendiri yang mendistribusikannya.
4. *Petani-petani-kolektif*. Upaya pemenuhan sarana produksi dapat pula secara kolektif, yaitu saling meminjamkan benih dan alat pertanian antar kelompok tani; misalnya dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).
5. *Petani-petani-individual*. Antara petani dan tetangga saling bantu meminjamkan benih juga merupakan fenomena yang umum di kalangan petani. Pola ini juga tidak membutuhkan dukungan kelembagaan apapun.
6. *Petani-pasar-individual*. Pola ini sesungguhnya paling banyak ditemukan, dimana petani membeli sendiri seluruh kebutuhan saprodi.

7. *Petani-pasar-kolektif*. Agar petani dapat mengakses saprodi dengan harga lebih murah lagi, atau marginnya dapat dinikmati petani, maka dapat saja penyediaan sarana produksi dilakukan secara kolektif melalui kelompok tani, koperasi, atau disediakan di Klinik Agribisnis.

Sementara dalam aktifitas pemasaran hasil produksi, setidaknya terdapat dua pilihan, yaitu:

1. *Petani-pasar-individual*. Pada sebagian besar wilayah dan pada banyak jenis komoditas pertanian, umumnya pemasaran hasil merupakan keputusan individual petani dan dapat dilakukannya sendiri.
2. *Petani-pasar-kolektif*. Pilihan untuk memasarkan secara kolektif merupakan bentuk yang ideal, karena posisi tawar petani menjadi lebih tinggi dalam struktur pemasaran.

Setiap bentuk aktifitas mesti memperhatikan seluruh warga, sehingga akan diperoleh pemahaman apa solusi yang paling sesuai. Dengan kata lain, pengembangan kelembagaan harus memperhatikan komunitas sebagai sebuah keseluruhan. Sebagai contoh, membangun kelompok tani merupakan salah satu bentuk opsi kelembagaan, namun tidak seluruh petani membutuhkan kelompok tani, dan sebaliknya juga sulit jika kelompok tani mencakup seluruh petani tanpa tersisa karena kondisi dan kebutuhan petani sangat beragam.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dari uraian di atas terlihat bahwa rancangan Prima Tani telah menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berbasis komunitas dalam setiap prosesnya. Pilihan terhadap paradigma ini dirasa tepat, karena konsep pembangunan pedesaan selama ini yang berlandaskan kepada pendekatan individual dan rumah tangga dipandang kurang berhasil. Dengan menerapkan basis komunitas, dapat dikatakan bahwa Prima Tani menghargai ikatan-ikatan sosial horizontal yang hidup dan berkembang di pedesaan. Ikatan horizontal ini merupakan salah satu elemen modal sosial

yang sangat besar yang selama ini kurang diperhatikan.

Bukti diterapkannya konsep pembangunan berbasis komunitas dalam rancangan program Prima Tani, setidaknya terlihat dari empat bentuk, yaitu: penetapan lokasi program pada desa sebagai unit terkecil, penerapan PRA dalam penyusunan rencana aksi yang dilakukan secara partisipatif, upaya meningkatkan kemandirian, serta penggunaan sumberdaya kelembagaan setempat. Upaya mendorong kemandirian warga sedesa dapat dipandang sebagai bentuk penguatan kesatuan masyarakat sebagai sebuah komunitas, karena salah satu ciri komunitas adalah keotonomiannya yang tinggi. Dengan kemandirian yang tinggi, maka keotonomian masyarakat terbangun dengan sendirinya.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan yang menerapkan prinsip basis komunitas adalah kebutuhan waktu yang lebih lama, karena setiap tahapan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat secara partisipatif. Proses tersebut dapat menjadi lebih cepat apabila dapat didorong melalui interaksi yang lebih intensif di antara sesama warga, karena kegagalan maupun keberhasilan program Prima Tani akan sangat bergantung kepada kesadaran, inisiatif, kreatifitas dan semangat warga desa, yang mampu menjalin kerjasama dengan baik. Untuk itu, para pelaksana perlu memahami bentuk dan pola komunitas yang berlangsung, dan kemudian berupaya mengembangkan rancangan program yang khas berdasarkan kondisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adhikari, Jay R.. 2001. Community Based Natural Resource Management in Nepal with Reference to Community Forestry: A Gender Perspective. *Journal of the Environment*, Vol. 6 No. 7, 2001. Ministry of Population and Environment. *dalam:* <http://www.cbnrm.net.>, 22 Maret 2005.

Adi, Isbandi R. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas. LP Fakultas Ekonomi UI, Jakarta. Edisi Revisi 2003.

Anonimus. 2005a. What is CBRM? *dalam:* http://www.stfx.ca/institutes/ccbm/text/what_is_cbm.html, 22 Maret 2005.

Anonimus. 2005b. Emerging Principles on Capacity Assessments and Capacity Building Strategies. *dalam:* <http://www.ecdpm.org.>, 21 Maret 2005.

Badan Litbang Pertanian. 2005. Pedoman Umum Prima Tani. *dalam:* http://Prima_Tani-Litbang.deptan.go.id/Pedoman_umum.php, 24 November 2005.

Conway, Gordon and Robert Chambers. 1992. Participatory Rural Appraisal (PRA). *dalam:* <http://www.iisd.org/casl/CASLGuide/PRA.htm>. 22 Maret 2005).

Crawford, Brian; Miriam Balgos; dan Cesario R. Pagdilao. 2000. Community-Based Marine Sanctuaries in the Philippines: A report on Focus Group Discussion. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, June 2000. Philippine Council for Aquatic and Marine Research and Development. *dalam:* http://www.crc.uri.edu/download/CB_000E.PDF., 6 Mei 2005.

Deptan. 2004. Pedoman Umum Prima Tani: Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Deptan. 18 hal.

Eade, Deborah and S. William. 1995. The Oxfam Handbook of Development and Relief. Oxfam, Oxford. Hal 9. *dalam:* Eade, Deborah. 1997. Capacity-Building: an Approach to People-Centered Development. Development Guidelines. Oxfam, UK and Ireland.

Eade, Deborah. 1997. Capacity-Building: an Approach to People-Centered Development. Development Guidelines. Oxfam, UK and Ireland.

Gibbs and Bromley, 1989. The Community-Based Natural Resource Management Network. *dalam:* www.cbnrm.net., 22 Maret 2005.

Mildeberger, Elisabeth. 1999. Capacity Building for Sustainable Development: Concepts, Strategies and Instruments of the German Technical Cooperation (GTZ). Unit 04, Strategic Cooperate Development. May 1999. *dalam:* www.sti.ch., 21 Maret 2005.

Mitchell, Bruce. 1994. Sustainable Development at The Village level in Bali, Indonesia. *Human Ecology an Interdisciplinary Journal*. Vol. 22 no. 3 September 1994. (pp. 189-211).

PBB. 2005. "The Community Capacity Building Program". *dalam:* www.cedresources.net, 18 Januari 2005.

Pranadji, Tri. 2004. Kerangka Perekayasaan Sosiobudaya Menuju Pertanian Industrial di Pedesaan. Makalah pada Workshop Sosialisasi Prima Tani bagi Tenaga Pe-

- mandu Teknologi Inovasi, Ciawi 12-17 Desember 2004.
- Simatupang, Pantjar. 2004. Prima Tani sebagai Langkah Awal Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis Industrial. Makalah pada Pelatihan Analisa Finansial dan Ekonomi bagi Pengembangan Sistem dan Usahatani Agribisnis Wilayah, 29 November – 9 Desember 2004.
- Soekanto, Soejono. 1999. Sosiologi: Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Cet ke 28. Hal 162-3
- Tjondronegoro, SMP. 1990. Gejala Organisasi dan Pembangunan Berencana dalam Masyarakat Pedesaan di Jawa. Bab III-6 (hal 215-241). *Dalam*: Masalah-Masalah Pembangunan.